

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan diatas, maka ada beberapa program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung program prioritas bupati diantaranya yaitu

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
2. Program promosi penanaman modal
3. Program pelayanan penanaman modal
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel IV.3 Daftar Program, Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Bupati

No	Program Prioritas Bupati	Program	Kegiatan
1	Program kemudahan akses dan ruang investasi menuju penciptaan iklim usaha dan iklim investasi kondusif	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
			Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
			Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
			Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur
			Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
			Kemitraan Usaha Nasional
			Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
2		Program promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3		Program pelayanan penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Hasil Analisis, 2025